

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai *caretaker* dan *public servant*, tentunya sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dalam memberikan jaminan hidup yang layak terhadap masyarakatnya. Terlebih di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi, dimana pemerintah berkewajiban untuk bertanggungjawab kepada masyarakat dengan keputusan dan kebijakan yang dibuat haruslah berdasarkan kebutuhan masyarakat bukan berdasarkan kepentingan suatu kelompok atau golongan. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah tentunya harus mengetahui kondisi dan fakta apakah yang sedang terjadi di masyarakat khususnya dalam hal ini kemiskinan. Dimana Indonesia masih terbilang sebagai negara yang tingkat kemiskinannya relatif tinggi. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut tentunya diperlukan sebuah kebijakan yang fokusnya adalah untuk mengatasi atau menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

Disaat ini seperti yang diketahui bahwa harga barang-barang pokok mulai berangsur naik bahkan cenderung harga barang-barang pokok sekarang sudah berkali-kali lipat dibanding sebelumnya, orang-orang tentunya merasakan dampaknya dari adanya kenaikan harga barang-barang pokok yang biasa mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Banyak bermunculan tuntutan dari masyarakat terkait apa kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam

menangani kenaikan harga barang-barang pokok ini sebab jika tidak diambil kebijakan untuk mengatasi hal ini, dikhawatirkan masyarakat akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Dengan adanya permasalahan tersebut dan banyaknya tuntutan dari masyarakat, tentunya pemerintah tidak hanya tinggal diam dan merasa bahwa tidak terjadi apa-apa. Pemerintah diharuskan melakukan upaya dengan mengeluarkan sebuah kebijakan untuk dapat tetap menjamin kebutuhan terkait barang-barang pokok yang harganya sedang melambung tinggi. Tentu dalam mengeluarkan sebuah kebijakan perlu dilakukan perencanaan yang matang terkait apakah kebijakan tersebut akan relevan dan apakah kebijakan tersebut akan berjalan dengan efektif seiring berjalannya waktu. Pada dasarnya, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang umumnya dipertimbangkan, direncanakan, dirumuskan, dan dipilih oleh para pembuat keputusan. Meskipun satu siklus kebijakan publik telah selesai, namun kenyataannya seringkali terungkap bahwa kebijakan tersebut belum berhasil mencapai tujuan karena kenyataan di lapangan terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH) ini nyatanya acapkali ditemukan fakta bahwa masih banyak masyarakat yang dapat dikatakan memenuhi persyaratan sebagai penerima PKH dan berhak untuk mendapatkan bantuan sosial tapi hingga saat ini belum juga mendapatkan bantuan sosial termasuk PKH itu sendiri.

Keluarga miskin merupakan salah satu masalah fundamental yang dihadapi Indonesia, sama seperti yang terjadi di Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramatjati Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta. Sebagai data yang diperoleh bahwa jumlah orang yang dikatakan miskin di Kelurahan Cililitan adalah sebanyak

11.816 jiwa (per tahun 2022) yang tersebar di 16 RW di wilayah Kelurahan Cililitan. Sedangkan untuk jumlah penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cililitan sebanyak 215 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Keluarga miskin ataupun kemiskinan merupakan masalah terkait sosial yang sifatnya mendunia yang berarti merupakan sebuah masalah yang akan selalu dihadapi dan menjadi sebuah fokus atau perhatian oleh seluruh negara. Walaupun dalam jenjang kemiskinan yang berbeda-beda, faktanya bahkan tidak ada satu pun negara terlepas dari permasalahan terkait kemiskinan.



Tabel 1.1 Data Jumlah Peserta Program PKH di Kelurahan Cililitan

No	Wilayah	Jumlah Penerima
1	RW 001	22 KPM
2	RW 002	11 KPM

3	RW 003	20 KPM
4	RW 004	6 KPM
5	RW 005	62 KPM
6	RW 006	35 KPM
7	RW 007	22 KPM
8	RW 008	2 KPM
9	RW 009	2 KPM
10	RW 011	0 KPM
11	RW 012	0 KPM
12	RW 013	6 KPM
13	RW 014	8 KPM
14	RW 015	11 KPM
15	RW 016	8 KPM
16	RW 017	0 KPM

Sumber: Data Petugas Pendamsos Kelurahan Cililitan

Kemiskinan dapat menyebabkan individu atau kelompok masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan mengelola secara efektif sumber daya yang tersedia di wilayah tempat tinggal mereka, termasuk sumber daya internal dan eksternal. Saat ini, upaya penanganan kemiskinan terkadang hanya terbatas pada bantuan jangka pendek atau sementara, yang pada akhirnya dapat menciptakan ketergantungan dan tidak mendorong proses pemberdayaan. Seharusnya, pendekatan yang lebih tepat adalah memberdayakan masyarakat

dengan mengoptimalkan potensi dan kekuatan yang dipunyai oleh masyarakat itu sendiri, serta memberikan kepercayaan pada mereka yang berada di tingkat sosial menengah ke bawah.

Kemiskinan sendiri tidak hanya dijumpai di negara Indonesia saja tetapi juga dapat ditemukan di negara-negara di belahan dunia lain seperti India, Zimbabwe, Sri Lanka, Afrika, Libya dan Argentina, bahkan di negara maju dan adidaya seperti di Jerman, Amerika Serikat, China, Russia, Australia, dan Inggris. Sehingga, semua negara di dunia ini sepakat bahwa kemiskinan ini merupakan permasalahan terkait kemanusiaan yang menjadi faktor penghambat dalam terciptanya kesejahteraan dunia dan semua negara di bumi ini setuju bahwa kemiskinan harus bisa dihadapi dan ditanggulangi dengan berbagai upaya akan kebijakan publik dari pemerintah.¹

Sebagaimana dikutip dari Tangkilisan (2003:2) Woll menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.² Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan konsolidasi dengan pihak-pihak terkait untuk dapat menemukan kebijakan yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Dari uraian tersebut, penulis akan melakukan penelitian terhadap salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan naiknya harga barang-barang pokok

¹ Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, (Bandung, Alfabeta)

² Wida Kurniasih, "15 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli" <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kebijakan-publik/> (diakses pada 30 Maret 2023, pukul 19.00)

yaitu kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini ditujukan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan tersebut dan apakah kebijakan tersebut efektif dan tepat sasaran.

1.2. Perumusan Masalah

Untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan pemerintah tersebut, penulis harus menganalisis dan meneliti perkembangan dari kebijakan tersebut yang sesuai dengan data di lapangan. Maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

- Bagaimana efektifitas program Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cililitan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui efektifitas dari program Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cililitan.

1.4. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini sekiranya dapat memperbanyak khazanah ilmu pengetahuan terhadap teori efektivitas program untuk peneliti atau mahasiswa lainnya.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini sekiranya dapat memberikan masukan yang berupa saran-saran dan pertimbangan oleh pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan atau menetapkan kebijakan terkait permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat demi kesejahteraan masyarakat.

1.5. Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan adalah untuk memfasilitasi pemahaman dan analisis lebih lanjut terhadap penelitian. Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri dari 5 bab, yang masing-masing memiliki uraian yang dapat dijelaskan secara garis besar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang terdapat pengantar yang secara besar-besaran melengkapi proposal penelitian yang mencakup informasi mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan susunan tulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan dan menjelaskan teori-teori yang menjadi landasan bagi pembahasan, termasuk salah satu pendekatan yang diadopsi

oleh pemerintah dalam menghadapi permasalahan yang ada. Tujuan dari paparan teori ini adalah untuk memberikan dasar bagi analisis data-data yang diperoleh dari masyarakat.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini mencakup penjelasan terkait pengembangan metodologi yang berisikan landasan teoritis, sumber data dan jenis data yang digunakan dalam penelitian, serta pendekatan dalam menganalisis data dari penelitian yang dilakukan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran dasar mengenai permasalahan yang ada di masyarakat dan efektifitas dari kebijakan yang diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat yaitu kenaikan harga barang-barang pokok.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan terkait penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan saran-saran untuk disampaikan kepada objek penelitian atau bagi penelitian di masa yang akan datang.